

EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) KELURAHAN SENAYANG KECAMATAN SENAYANG KABUPATEN LINGGA TAHUN 2020

Sandri Gustyansyah¹, Nur Aslamaturrahmah Dwi Putri², Nazaki³
sandrigustyanssss98@gmail.com

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

To overcome poverty in Indonesia, one of the programs issued by the government is the Family Hope Program (PKH). PKH is a conditional cash transfer program that aims to improve the quality of poor families with the requirements to access certain health and education services that have been set for poor families. In Kelurahan Senayang, the PKH program has been implemented, but the results are still not optimal. The purpose of this study is to find out the results of the Family Hope Program (PKH) in Kelurahan Senayang, Senayang Subdistrict, Lingga Regency in 2020. In this study, the author uses a qualitative descriptive type of research. In this study, the informants consisted of 7 people. The data analysis technique used in this study is a qualitative descriptive data analysis technique. The results of this study are still not optimal, because the poverty rate is still high in the Senayang Village area, and PKH recipients have not changed, there are still many residents who receive PKH assistance but have not received it.

Keyword: Keyword : Evaluation, Program, Poor.:

I. Pendahuluan

Kesejahteraan sosial menjadi tujuan utama dari setiap negara di dunia. Salah satu hambatan untuk mencapai kesejahteraan adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah global yang dialami oleh semua negara didunia. Masalah kemiskinan tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang dan terbelakang, melainkan juga dialami oleh negara-negara maju meski jumlahnya tidak besar. Di Indonesia khususnya masih banyak terdapat penduduk yang miskin. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab kemiskinan antara lain rendahnya tingkat pendapatan dan sumber daya produktif yang menjamin kehidupan yang berkesinambungan, kelaparan dan kekurangan gizi, rendahnya tingkat kesehatan, keterbatasan dan kurangnya akses kepada pendidikan dan layanan-layanan pokok lainnya.

Salah satu program dari pemerintah untuk mengatasi kemiskinan yang ada adalah Program Keluarga Harapan (PKH). PKH adalah program bantuan tunai bersyarat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga sangat miskin dengan syarat mengakses layanan kesehatan dan pendidikan tertentu yang telah ditetapkan bagi keluarga miskin. PKH tersebut berbeda program perlindungan sosial lainnya yang berbentuk bantuan tunai, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BL serta Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Dengan pemberian akses PKH ini, diharapkan SM) terjadi perubahan perilaku yang dapat

mendukung tercapainya kesejahteraan sosial. Program ini memberi bantuan uang tunai kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) dengan catatan mengikuti persyaratan. Persyaratan tersebut terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Dengan adanya PKH diharapkan mampu mendorong perubahan perilaku penerima Prorgam PKH menjadi bersekolah dan mengakses fasilitas kesehatan.

Rendahnya penghasilan keluarga miskin menyebabkan keluarga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan, untuk tingkat minimal sekalipun. Pemeliharaan kesehatan ibu sedang mengandung pada keluarga miskin sering tidak memadai sehingga menyebabkan buruknya kondisi kesehatan bayi yang dilahirkan. PKH lebih dimaksudkan kepada upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. Berdasarkan pengalaman negara-negara lain, program serupa sangat bermanfaat terutama bagi keluarga dengan kemiskinan kronis. Pelaksanaan PKH di Indonesia diharapkan akan membantu penduduk termiskin, bagian masyarakat yang paling membutuhkan uluran tangan dari siapapun juga. Pelaksanaan PKH secara berkesinambungan dapat membantu mengatasi kemiskinan yang ada. PKH diarahkan untuk membantu kelompok sangat miskin dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan, selain memberikan kemampuan kepada keluarga untuk meningkatkan pengeluaran konsumsi. Tujuan umum PKH adalah mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan merubah perilaku Rumah Tangga Miskin (RTM) yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan.

Kelurahan Senayang termasuk ke dalam Kecamatan Senayang yang merupakan bagian dari Kabupaten lingga, yang pada umumnya masyarakat kelurahan Senayang bermata pencaharian sebagai nelayan. Di kelurahan Senayang masih banyak masyarakat yang miskin. Melihat kondisi yang terjadi di Kelurahan Senayang dalam PKH cenderung begitu miskin. Maka diperlukan adanya bantuan PKH) agar keluarga yang sangat miskin dapat terbantu dari PKH dengan menjalankan dan melaksanakan dana dari pemerintah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, seperti halnya menyekolahkan anaknya dan mengutamakan kesehatannya.

Di kelurahan Senayang sebagian masyarakatnya termasuk ke dalam Rumah Tangga Miskin (RTM), penduduknya rata-rata bermata pencaharian sebagai nelayan, yang kadang penghasilannya tidak menentu, bahkan dikatakan beradu nasib ditengah lautan untuk mencari ikan dan diharapkan dapat menjualnya dengan hasil yang sesuai kepada tengkulak. Banyaknya masyarakat yang memerlukan perhatian dari pemerintah, yang mana masyarakat di kelurahan Senayang tidak banyak masyarakat mempunyai pekerjaan tetap, ada yang berkuli, pengangguran dan selebihnya bekerja sebagai nelayan.

Tabel 1.1 Daftar Mata Pencaharian Masyarakat Kelurahan Senayang

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Nelayan	437 orang
2.	Pelaku Usaha Perikanan	92 orang
3.	Usaha Mikro	36 orang
4.	Aparatur Sipil Negara (ASN)	152 orang
5.	Jumlah	717 orang

Sumber: Olahan Peneliti, 2020.

Berdasarkan tabel diatas mata pencaharian masyarakat di kelurahan Senayang sebagian besar sebagai nelayan. Kondisi seperti ini membuat masyarakat Kelurahan Senayang terkendala dibidang ekonomi dan juga kesehatan. Masyarakat kelurahan senayang sudah mendapatkan bantuan

PKH sejak lama. Namun realita yang ada di Kecamatan Senayang, khususnya di Kelurahan Senayang, tidak berjalan semestinya, bantuan yang diberikan tersebut tidak tepat sasaran, sehingga masih banyak penduduk yang sangat miskin tidak mendapatkan bantuan dari PKH tersebut. Maka diperlukan keadilan dari pemerintah kelurahan Senayang untuk dapat meratakan pemberian bantuan Program Keluarga Harapan kepada penduduk yang benar-benar layak mendapatkannya, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Syarat-syarat PKH. Adapaun syarat-syarat penerima bantuan PKH yaitu Ibu hamil (Bumil) atau Balita , SD/Sederajat, SMP/Sederajat, dan SMA/Sederajat, Penyandang disabilitas dan lan nsia usia 70 tahun ke atas.

Pemberian bantuan PKH dikelurahan Senayang dimulai pada tahun 2015 yang dilaksanakan pihak Kelurahan Senayang.

Tabel 1.2 Daftar Rumah Tangga Miskin Kelurahan Senayang

NO	RT/RW	Jumlah
1.	01/01	15
2.	02/01	10
3.	03/01	13
4.	04/02	19
5.	05/02	5
6.	06/02	9
7.	07/03	8
8.	08/03	7
9.	09/03	16
10.	10/04	8
11.	11/04	14
12.	12/04	11
13.	13/05	12
14.	14/05	11
Jumlah		158

Sumber: Olahan Peneliti, 2020.

Tabel 1.3 Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

NO	RT/RW	Jumlah
1.	01/01	10
2.	02/01	8
3.	03/01	4
4.	04/02	13
5.	05/02	5
6.	06/02	7
7.	07/03	6
8.	08/03	7
9.	09/03	8
10.	10/04	6
11.	11/04	9
12.	12/04	7
13.	13/05	5
14.	14/05	5
Jumlah		100

Sumber: Olahan peneliti, 2020.

Berdasarkan dari tabel diatas Rumah Tangga Miskin berjumlah 158, sedangkan penerima bantuan PKH berjumlah 100. Adapun bantuan yang diberikan berupa bantuan untuk sekolah dalam satu tahun (SD menerima Rp 900.000, SMP menerima Rp 1.500.000, dan SMA menerima Rp 2.000.000), bantuan sembako (beras dalam satu tahun sebanyak 6 kg, telur satu papan, dan kacang hijau satu kilo), dan bantuan kesehatan berupa BPJS Kesehatan. Selama masa pandemi covid-19 pemerintah kelurahan memberikan bantuan sembako berupa (beras 10 Kg, tepung 4 kg, gula 4 Kg, dan minyak makan 4 botol berukuran 900 ml. Telah dicocokkan Rumah Tangga Miskin di Kelurahan Senayang berdasarkan data kecamatan Senayang, bahwa sama jumlahnya data Rumah Tangga Miskin kelurahan Senayang yang tercatat di Kecamatan Senayang. Diketahui jumlah penerima PKH di Kelurahan senayang terhitung dari tahun 2015 hingga sekarang tidak mengalami perubahan, sedangkan masih banyak masyarakat miskin yang berhak menerima bantuan PKH. Adapun yang menjadi fokus penelitian disini yaitu Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Senayang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga Tahun 2020.

Kerangka Teori

1. Kebijakan Sosial

Menurut Anderson (dalam Eki Darmawan dkk, 1984:113) mengatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan masalah. Selanjutnya Anderson mengklarifikasi kebijakan menjadi dua : substansif dan prosedural. Kebijakan substansif yaitu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah, sedangkan kebijakan prosedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan.

Menurut Edi Suharto (dalam Nurdiana, 2017: 17) kebijakan sosial adalah salah satu bentuk dari kebijakan publik yang merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Kebijakan sosial juga adalah ketetapan yang dirancang secara kolektif untuk mencegah terjadinya masalah sosial (fungsi preventif), mengatasi masalah sosial (fungsi karatif) dan mempromosikan kesejahteraan (fungsi pengembangan) wujud kewajiban negara (*state obligation*) dalam memenuhi hak warga negaranya. Dalam hal lainnya, kebijakan sosial dapat dikatakan sebagai sebuah aspek sosial. Kebijakan sosial adalah prinsip-prinsip, prosedur dan tata cara dari undang-undang yang telah ada, sebagai panduan registrasi dan regulasi pada lembaga yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Kebijakan sosial memiliki sejumlah dimensi, yakni:

1. Sebagai suatu proses, kebijakan sosial dipandang sebagai dinamika perumusan kebijakan dalam kaitannya dengan variabel-variabel sosio-politik dan teknik-metodologi.
2. Kebijakan sosial merupakan suatu proses tahapan atau pengembangan rencana tindak atau plan-action.
3. Sebagai suatu produk, sebagai kebijakan sosial dipandang sebagai hasil akhir dari proses perumusan kebijakan atau perencanaan sosial.
4. Sebagai suatu kinerja atau performance atau pencapaian tujuan, kebijakan sosial merupakan deskripsi atau evaluasi terhadap hasil-hasil implementasi produk kebijakan sosial.

Kebijakan sosial hadir sebagai cara untuk memecahkan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial bagi semua golongan masyarakat yang mempermudah dan meningkatkan kemampuan mereka dalam menanggapi perubahan sosial. Kebijakan sosial senantiasa berorientasi kepada pencapaian tujuan sosial. Tujuan sosial ini mengandung dua pengertian yang saling terkait, yakni: memecahkan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial.

2. Implementasi Kebijakan

Menurut Hinggis (dalam Eni Ardianti, 2017: 5) mendefinisikan implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang didalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi.

Menurut Ripley dan Franklin (dalam Budi Winarno, 2014:148) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai faktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

Van Mater dan Van Horn (dalam Dewi Rahayu, 2016), mendefinisikan bahwa implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan..

Dari penjelasan-penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

3. Evaluasi

a. Konsep Evaluasi

Menurut Subarsono (2016:119), evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kerja suatu kebijakan. Menurut Rossi dan Freeman (dalam Pasolog 2013:6) bahwa evaluasi digunakan untuk mempelajari tentang hasil yang diperoleh dalam suatu program untuk dikaitkan dengan pelaksanaannya, mengendalikan tingkah laku dari orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program, dan mempengaruhi respon dari mereka yang berada diluar lingkungan publik.

Menurut Badjuri dan Admin (dalam Pasolog 2013:60) mengatakan bahwa evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam kebijakan. Keban (dalam Pasolog 2013:60), salah satu bidang lain yang dipergunakan untuk mengawasi jalannya proses implementasi adalah monitoring. Di dalam proses monitoring ini dilakukan pengamatan langsung ke lapangan dan hasil-hasil sementara untuk dinilai tingkat efisiensi dan efektivitasnya. Lalu, menurut Edi Suharto (2007:40) secara formal, evaluasi merupakan tahap “akhir” dari sebuah proses pembuatan kebijakan. Namun, demikian dari evaluasi ini dihasilkan masukan-masukan guna menyempurnakan kebijakan atau perumusan kebijakan selanjutnya, dengan begitu proses formulasi kebijakan menjadi mirip roda atau spiral yang berputar tiada akhir.

b. Tujuan Evaluasi

Menurut Subarsono (2016:120-122), bahwa evaluasi memiliki beberapa tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Meningkatkan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
3. Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.
4. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap ini lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak positif maupun negatif.
5. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran pencapaian target.
6. Sebagai bahan masukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

c. Alasan Evaluasi Kebijakan

Evaluasi sangat diperlukan untuk keperluan jangka panjang dan untuk kepentingan keberlanjutan (*sustainable*) suatu program. Subarsono (2016:123-124) memberikan beberapa argumen perlunya evaluasi.

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas suatu kebijakan, yakni seberapa jauh suatu kebijakan mencapai tujuannya.
2. Mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal. Dengan melihat tingkat efektivitasnya, maka dapat disimpulkan apakah suatu kebijakan itu berhasil atau gagal.
3. Memenuhi aspek akuntabilitas publik. Dengan melakukan penilaian kinerja suatu kebijakan, maka dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik sebagai pemilik dana dan mengambil manfaat dari kebijakan dan program pemerintah.
4. Menunjukkan pada Stakeholders manfaat suatu kebijakan. Apabila tidak dilakukan evaluasi terhadap sebuah kebijakan, para stakeholder, terutama kelompok sasaran tidak mengetahui secara pasti manfaat dari sebuah kebijakan atau program.
5. Agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pada akhirnya, evaluasi kebijakan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi proses pengambilan kebijakan yang akan datang agar tidak melakukan kesalahan yang sama.

d. Pendekatan Terhadap Evaluasi

William N. Dunn (dalam Subarsono 2016: 124-125) menyebutkan ada tiga jenis pendekatan terhadap evaluasi, yaitu:

1. Evaluasi Semu (*Pseudo Evaluation*)

Pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid tentang hasil-hasil kebijakan, tanpa menanyakan manfaat atau nilai dari hasil kebijakan tersebut pada individu, kelompok, atau masyarakat. Asumsi yang digunakan adalah bahwa ukuran manfaat atau nilai terbukti dengan sendirinya atau tidak kontroversial.

2. Evaluasi Formal (*Formal Evaluation*)

Pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan yang secara formal diumumkan sebagai saran program kebijakan. Asumsi yang digunakan adalah bahwa tujuan dan sasaran yang ditetapkan secara formal merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai.

Dunn (2013:614) menyebutkan, evaluasi formal memiliki dua tipe utama, yaitu evaluasi sumatif dan evaluasi formatif. Evaluasi sumatif meliputi usaha untuk memantau pencapaian tujuan dan target formal setelah suatu kebijakan atau program diterapkan untuk jangka waktu tertentu. Sebaliknya, evaluasi formatif meliputi usaha-usaha untuk secara terus-menerus memantau pencapaian tujuan-tujuan dan target formal. Karakteristik evaluasi formatif adalah jumlah titik waktu dimana hasil kebijakan dipantau.

3. Evaluasi Proses Keputusan Teoritis (*Decision Theoretic Evaluation*)

Pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai stakeholders. Dalam hal ini, evaluasi keputusan teoritik berusaha untuk menentukan sasaran dan tujuan yang tersembunyi dan dinyatakan oleh para stakeholders.

c. Indikator Evaluasi

Untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan perlu dikembangkan beberapa indikator, karena penggunaan indikator tunggal akan membahayakan, dalam arti hasil penelitiannya dapat bias dari sesungguhnya. William N. Dunn (2013:610) mengembangkan indikator atau kriteria evaluasi mencakup enam indikator sebagai berikut:

Tabel 2.1. Indikator Evaluasi Kebijakan

NO	Kriteria	Penjelasan
1.	Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?
2.	Efisiensi	Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil sesuai yang diinginkan?
3.	Kecukupan	Seberapa jauh yang telah tercapai dapat memecahkan masalah?
4.	Pemeratan	Apakah biaya dan manfaat yang didistribusikan merata pada kelompok masyarakat yang berbeda?
5.	Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
6.	Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna dan bernilai?

Sumber: William, N.Dunn (2013:2016)

Berdasarkan uraian diatas mengenai pendekatan-pendekatan evaluasi serta kriteria-kriteria evaluasi yang telah disebutkan pada tabel di atas, maka di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan evaluasi kebijakan formal dengan tipe evaluasi formatif. Evaluasi ini dilakukan ketika kebijakan atau program tersebut sedang dilaksanakan untuk memfokuskan pada penilaian dari efektivitas PKH sehingga dapat memenuhi sejauh mana ketercapaian tujuan dari PKH. Guna mengukur ketercapaian tujuan tersebut, peneliti menentukan indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan yang dilakukan pada identifikasi tujuan program sebagai bagian dari domain perubahan individu yang terkait dengan tujuan PKH.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti ingin melihat “Bagaimana Capaian Program Keluarga Harapan (PKH) Kelurahan Senayang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga Tahun 2020?”

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui hasil dari program keluarga harapan (PKH) di Kelurahan Senayang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga Tahun 2020.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode deskriptif kualitatif adalah menitikberatkan pada observasi dan suasana ilmiah (*natural setting*), peneliti terjun langsung ke lapangan, bertindak sebagai pengamat. Peneliti membuat kategori perilaku, mengamatai gejala, dan mencatatnya dalam buku observasi.

Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Untuk mengumpulkan data primer dan sekunder peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu cara untuk memperoleh data melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh keterangan yang relevan dengan objek penelitian.

Dengan melakukan observasi, peneliti mencatat apa saja yang dilihat dan mengambil dari dokumen yang tertulis untuk memberikan gambaran secara utuh tentang objek yang akan diteliti.

c. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya-jawab dengan responden/informan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian.

d. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan cara mencatat data-data, pengumpulan data berdasarkan dokumen-dokumen, foto-foto dan arsip yang relevan dengan objek yang diteliti.

e. Informan

Informan adalah orang yang berada pada lingkup penelitian, artinya orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, untuk memperoleh data secara representative, maka diperlukan informan kunci yang memahami dan mempunyai kaitan dengan permasalahan yang sedang diuji.

Teknik analisa data

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan mencari, mencatat, dan mengumpulkan data melalui hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi, yang terkait dengan Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Senayang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga.

b. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data (kasar) yang ada dalam fieldnote. Merupakan catatan hasil wawancara dan observasi pada penelitian data kualitatif. Reduksi data adalah bagian analisis yang mempersingkat dan membuat fokus serta membuang hal yang tidak penting, mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

c. Penyajian data (*Data Display*)

Sistematis sehingga mudah dipahami. Penyajian data ini harus mengacu pada perumusan masalah yang dijadikan sebagai pertanyaan sehingga yang tersaji adalah deskriptif mengenai kondisi yang menceritakan permasalahan yang ada.

d. Penarikan Kesimpulan (*Conclution Drawinger*)

Kesimpulan merupakan hal yang paling penting sebagai upaya untuk melakukan justifikasi temuan peneliti. Justifikasi dilakukan dengan cara menarik hubungan dari latar belakang permasalahan dan tujuan penelitian untuk mencari jawaban hasil penelitian yang selanjutnya dianalisis

III. Hasil dan Pembahasan

Deskripsi objek dan lokasi penelitian

Kelurahan Senayang adalah salah satu kelurahan dari kecamatan Senayang, dan terdiri dari beberapa desa. Kelurahan Senayang merupakan bagian dari wilayah administrasi pemerintahan kecamatan Senayang, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Kelurahan Senayang memiliki luas wilayah 37,00 km² dan ketinggian tanah 30 meter diatas permukaan air laut. Secara astronomis kelurahan Senayang terletak pada koordinat 0°,02',25" LU dan 104°,39',07"BT. Kondisi iklim suhu udara rata-rata berkisar 38°C. Secara umum kelurahan Senayang berbatasan dengan sebelah utara Desa Baran, sebelah Selatan Kecamatan Lingga Utara, Sebelah Barat Desa Tanjung kelit,

dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Laboh, selain itu jarak dari pemerintah kelurahan dengan pemerintah kabupaten 41 km, jarak dari pemerintah kelurahan dengan pemerintah kota 30 Km, dan jarak dari pemerintah Provinsi 252 Km.

Hasil penelitian

1. Efektivitas

a. Pengurangan angka kemiskinan dimasa mendatang

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan, maka dapat dianalisa bahwa pengurangan angka kemiskinan dimasa yang akan datang, dibilang belum tercapai sesuai yang diharapkan, berdasarkan data penerima PKH di Kelurahan Senayang dari tahun 2015 yang melakukan graduasi mandiri itu tidak ada sama sekali, sehingga mengakibatkan masih adanya 58 orang yang terdaftar dalam rumah tangga miskin yang tidak mendapatkan bantuan PKH tersebut. hal ini tidak berimbang, dimana setiap tahunnya selalu ada penambahan masyarakat penerima bantuan PKH.

2. Efisiensi

a. SDM dalam Pelaksanaan Program

Dari hasil wawancara yang dilakukan bersama informan, maka dapat dianalisa bahwa SDM PKH tersebut sudah direkrut dengan baik yang dibekali dengan pelatihan-pelatihan untuk turun lapangan berhadapan langsung dengan masyarakat.

b. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan maka dapat dianalisa bahwa hambatan-hambatan yang dirasakan oleh para pelaksana program saat survei turun ke lapangan yaitu mengenai data, yang mana masyarakat miskin banyak yang belum terdaftar di DTKS. Dikarenakan kurangnya pemahaman dari masyarakat mengenai prosedur dalam mengusulkan dan mendaftarkan diri ke DTKS.

3. Kecukupan

a. Besaran bantuan dari Pemerintah Pusat

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan diatas maka dapat dianalisa bahwa bantuan dari program PKH masih dirasa kurang oleh masyarakat itu sendiri, namun sebaliknya mereka tetap menerina dan mensyukuri apa adanya terhadap bantuan yang diberikan dari program ini, mereka bisa menggunakan bantuan uang tersebut untuk membayar spp dan juga kebutuhan lainnya, setidaknya bisa meringankan perekonomian dan digunakan sesuai dengan komponen yang didapatkan.

4. Pemerataan

a. Sosialisasi menyeluruh tentang Program PKH

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan maka dapat dianalisa bahwasanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kelurahan Senayang masih kurang, dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui informasi dan mengerti mengenai bantuan Program PKH tersebut.

b. Mendata masyarakat yang sesuai dengan kriteria penerima bantuan program

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan seluruh informan diatas maka dapat dianalisa bahwasannya pihak Kelurahan Senayang masih kurangnya sosialisasi mengenai bantuan program PKH ini sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui informasi dan memahami prosedur untuk mendapatkan bantuan program PKH tersebut.

5. Responsivitas

a. Respon masyarakat tentang adanya program PKH

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh seluruh informan diatas maka dapat dianalisa bahwa masukan, kritik, dan saran yang diberikan oleh penerima bantuan program kepada pendamping PKH di nilai baik, masukan, kritik, dan saran dapat diterima dan ditampung oleh para pendamping PKH yang nantinya akan disampaikan kepada dinas terkait agar proses pelaksanaan program bantuan akan berjalan dengan baik kedepannya. Para pendamping PKH hanya bisa memberikan informasi-informasi yang berkenaan dengan program tersebut, agar tidak lagi muncul pertanyaan-pertanyaan dan keluh kesah dari masyarakat yang tidak menerima bantuan dari program tersebut.

6. Ketepatan

Ketepatan disini erat kaitannya dengan layak atau tidaknya program PKH ini dilaksanakan di Kelurahan Senayang ini. Dengan melihat kondisi ekonomi yang masih lemah di Kelurahan Senayang ini, dan masyarakatnya rata-rata yang bermata pencaharian sebagai nelayan, bahkan ada anak-anak yang putus sekolah, maka bantuan program PKH ini tepat dilaksanakan di wilayah Kelurahan Senayang ini. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh seluruh informan maka dapat dianalisa bahwa pelaksanaan bantuan program PKH dinilai tepat dan baik dilaksanakan di wilayah Kelurahan Senayang ini mengingat kondisi perekonomian di wilayah ini masih sangat lemah. Lemahnya perekonomian disini sangat mempengaruhi kepada masyarakatnya seperti masih adanya anak-anak yang putus sekolah, bahkan tidak bersekolah, dan rata-rata penduduknya bemata pencaharian sebagai nelayan yang penghasilannya tidak menentu, dengan kondisi seperti ini menjadikan wilayah Kelurahan Senayang lokasi yang strategis terhadap pelaksanaan bantuan program PKH ini.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh peneliti terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) Kelurahan Senayang Kecamatan Kabupaten Lingga Tahun 2020, maka dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan bantuan program PKH masih belum optimal, dikarenakan angka kemiskinan masih tinggi diwilayah Kelurahan Senayang, serta penerima PKH masih belum berubah, masih banyak seharusnya warga yang menerima bantuan PKH tersebut namun belum mendapatkannya. Belum tercapainya hasil yang diinginkan dari program ini yang diukur berdasarkan teori dan kriteria William N.Dunn, diantaranya:

1. Efektivitas

Dalam pelaksanaan program bantuan PKH, efektivitas program berkaitan erat dengan sejauh mana pelaksanaan dari program PKH tersebut telah mencapai tujuan yang diharapkan. Efektivitas program dapat dilihat dari SDM yang menjalankan tugasnya mulai dari ruang lingkup dimasyarakat dari RT, Kelurahan, hingga ke pemerintah kabupaten, sebagaimana yang dimaksud dalam proses pengurangan angka kemiskinan dimasa yang akan datang di Kelurahan Senayang sendiri masih belum efektif, dikarenakan masyarakat yang keluar dari program PKH atau Graduasi mandiri dari tahun 2015 sampai tahun 2021 itu tidak ada sama sekali dan penerimanya masih dengan orang-orang yang sama, hal ini tentu tidak berimbang dengan jumlah masyarakat miskin yang akan menjadi penerima program bantuan setiap tahunnya terus bertambah.

2. Efisiensi

Dalam pelaksanaan program bantuan PKH, efisiensi program berkaitan dengan Sumber Daya Manusia, dan hambatan-hambatan pelaksanaan program. Dari hasil penelitian mengenai Program bantuan PKH di Kelurahan Senayang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga sudah baik, hal tersebut dikarenakan para pelaksana program PKH sudah layak dan mampu dengan gelar pendidikan Starata 1 (S1) dan Diploma 3 (D3). Lalu dengan hambatan dalam proses pelaksanaan masih belum berjalan dengan baik, dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai prosedur untuk mendapatkan bantuan PKH tersebut.

3. Kecukupan

Dalam pelaksanaan Program PKH, kecukupan berkaitan dengan kepuasan dari peserta PKH dalam mencukupi kebutuhannya, baik itu dari segi pendidikan, dan kesehatan. Dari hasil penelitian Program PKH di Kelurahan Senayang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga dinilai masih belum begitu tercukupi, hal ini dikarenakan jumlah bantuan program PKH yang diterima masyarakat dirasakan masih kurang, akan tetapi mereka merasa bersyukur dengan adanya bantuan dari program PKH ini.

4. Pemerataan

Dalam pelaksanaan program bantuan PKH, pemerataan yaitu mengenai sosialisasi dan proses pendataan masyarakat yang sesuai dengan kriteria program. Dari hasil penelitian di Kelurahan Senayang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga dinilai masih belum merata, hal ini dikarenakan masih adanya masyarakat yang masih belum mengetahui mengenai bantuan program PKH ini sehingga menyebabkan masih adanya masyarakat yang belum mendapatkan bantuan ini dikarenakan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kelurahan masih di nilai kurang.

5. Responsivitas

Dalam pelaksanaan program bantuan PKH, responsibilitas yaitu respon masyarakat penerima bantuan PKH ini mengenai pelaksanaan program PKH itu sendiri. Dapat disimpulkan bahwa peserta penerima bantuan PKH mereka merasa puas dengan adanya bantuan program ini, terbukti dengan hasil wawancara yang dilakukan bersama masyarakat penerima bantuan PKH.

6. Ketepatan

Dalam pelaksanaan program bantuan PKH, ketepatan disini erat kaitannya dengan layak atau tidaknya program PKH ini dilaksanakan di Kelurahan Senayang ini. Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Senayang, dinilai tepat dan baik dilaksanakan di wilayah Kelurahan Senayang dengan melihat kondisi ekonomi masyarakat yang masih lemah di Kelurahan Senayang ini, dan masyarakatnya rata-rata yang bermata pencaharian sebagai nelayan, bahkan ada anak-anak yang putus sekolah, maka bantuan program PKH ini tepat dilaksanakan di wilayah Kelurahan Senayang ini.

V. Daftar Pustaka

Anderson James E. 2003. *Public Policy Making, Fifth Edition*. USA: Houghton Mifflin Company.

Dunn, William N. 2013. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Djaenuri M. Aries. 2015. *Kepemimpinan Etika, dan Kebijakan Pemerintah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Darmawan Eki, Doni Septian, dan Ryan Anggria Pratama. 2017. *Kebijakan Sektor Publik*. Tanjungpinang: UMRAH Press.

Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta

Rahayu Kusuma Dewi. 2016. *Studi Analisis Kebijakan*. Bandung.: Pustaka Setia
Subarsono, AG. 2016. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Winarno Budi. 2014. *Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus*.
Yogyakarta: CAPS.

B. Jurnal dan Dokumen

Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2020

Ardianti, E. (2017). Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang. *Universitas Maritim Raja Ali Haji*.

Nurdiana. (2017). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.

C. Peraturan Perundang-undangan

Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH).

Peraturan Presiden (perpres) No.15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan.